



Kedutaan Besar Republik Indonesia
2020 Massachusetts Avenue NW
Washington, D.C. 20036

Tel.: (202) 775-5200
Fax : (202) 775-5365
information@embassyofindonesia.org

***"RAKYAT PERLU BERPERAN AKTIF DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
KORUPSI DI INDONESIA"***

Proses demokratisasi yang terus bergulir di Indonesia merupakan pendorong bagi terus dilakukannya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, demikian salah satu hal yang mengemuka dalam seminar bertopik "*Transparency and Anti-Corruption Challenges in Indonesia*" pada tanggal 12 Oktober 2005, yang disponsori KBRI Washington DC dan Bank Dunia, dengan organisator United States-Indonesia Society (USINDO) dan US-ASEAN Business Council.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut Dr. Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Erry Riyana Hardjapamekas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Dr. Leonard Ginocchi dari CBP Foreign Customs Administration; Dr. Homi Kharas, Chief Economist of the East Asia and Pacific Region World Bank; serta Joe Babiec dari Kantor Pengacara Booz Allens.

Dalam sambutan selamat datangnya, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington DC, Andri Hadi, menyebutkan bahwa seminar tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan RI dalam memberantas tindak korupsi dan pencucian uang, khususnya kepada kalangan bisnis. Demokratisasi di Indonesia menyebabkan meningkatnya tuntutan akan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan fokus utama pada isu korupsi. Oleh karena itu Pemerintah RI menempatkan komitmen memerangi korupsi dalam agenda besarnya, sebagaimana tercermin dari kampanye Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi yang dimotori langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Desember tahun 2004 lalu. Penyelenggaraan seminar ini merupakan salah satu bentuk dukungan KBRI Washington DC pada komitmen nasional tersebut.

Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah RI juga memasukkan berbagai inisiatif untuk melibatkan masyarakat sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi, di samping tindakan preventif, penyelenggaraan

investigasi, serta pelaksanaan supervisi dan pengawasan, khususnya terhadap berbagai lembaga publik yang dinilai rawan tindak korupsi.

Erry Riyana Hardjapamekas menggarisbawahi bahwa komitmen terhadap reformasi, khususnya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, harus memberikan prioritas pada reformasi birokrasi lembaga-lembaga publik. Menurut Erry, perlu segera dilakukan tinjauan, yang diikuti dengan pemberian rekomendasi, atas sistem yang berlaku saat ini beserta sumber daya manusia terkait. Dalam hal ini, Erry Riyana Hardjapamekas menekankan empat petugas negara yang perlu memperoleh perhatian khusus, yakni hakim, jaksa, polisi/militer, serta petugas-petugas keuangan seperti bea cukai dan pajak.

Seminar yang berlangsung selama lebih kurang dua jam ini cukup menyita perhatian khalayak, terbukti dari padatnya ruangan tempat penyelenggaraan seminar serta antusiasme para peserta seminar untuk mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah RI dalam menangani praktek-praktek pencucian uang dan mengatasi masalah korupsi.

Pada umumnya para pembicara sepakat bahwa terdapat beberapa hal yang menentukan keberhasilan usaha-usaha tersebut, antara lain pembenahan sistem peradilan dan manajemen sumber daya manusia di dalamnya, penyediaan perangkat hukum yang memadai serta partisipasi aktif rakyat.

Minister Counselor Ekonomi KBRI Washington D.C., Ibnu Hadi, menyatakan bahwa di samping seminar di Washington DC ini, seminar yang membahas anti korupsi dan anti pencucian uang diselenggarakan pula di Los Angeles pada tanggal 11 Oktober 2005, serta New York City pada tanggal 14 Oktober 2005. Di samping itu, demikian Ibnu Hadi, para anggota KPK dan PPATK yang berada di Washington D.C. untuk seminar tersebut melakukan pertemuan pula dengan Dr. Karl Jackson, Penasehat Presiden Bank Dunia; Mr. Andy Baukol, Direktur US Department of Treasury; serta sejumlah instansi lain yang terkait seperti Bank Dunia, Department of State, Department of Justice, FBI, Security Exchange Commission (SEC), dan Millennium Challenge Corporation.

Washington DC, 13 Oktober 2005